

# PERANG RUSIA, COVID 19 DAN REVITALISASI AGRIKULTURAL: MENIMBANG GAGASAN POLITIK PERTANIAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1989)

Hasan Mustapa, Siti Kania

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STAI Sabili Bandung  
hmustafa396@gmail.com, kania2@gmail.com

## Abstract

In the midst of the ongoing Covid 19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine poses a threat to global food security, including Indonesia. Faced with this threat, the management of national food politics is still skewed by conglomerates and oligarchs, resulting in far from democratic national agricultural policies. Agricultural revitalization efforts are one way to deal with this situation. This article seeks to understand how Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989), an Indonesian Islamic political thinker, responded to the agricultural development process in critical situations such as war and, more recently, the Covid-19 outbreak. According to him, the agricultural industry can be revitalized in two ways: macro and micro. At the macro level, through the evaluation of rice import policies, food-based economic political orientation, and agricultural industry revitalization. On a micro level, rice prices can be stabilized by providing farmer credit, reactivating agricultural cooperatives, and facilitating access to food distribution..

**Key word:** *Russian Invasion, Covid-19, Food Security, Agricultural Revitalization*

## A. Pendahuluan

Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru saat Angkatan Laut Rusia mencegah 200-300 kapal yang kebanyakan pengangkut gandum, meninggalkan Laut Hitam. Kawasan subur yang terkenal sebagai “keranjang roti dunia” ini merupakan salah satu rute global perdagangan gandum dari Ukraina. Selain pemblokiran Laut Hitam, Rusia juga akan melakukan pembatasan ekspor gandum dan pupuk sebagai balasan atas sanksi ekonomi Barat. Sikap politik Rusia ini dikhawatirkan dapat mengancam pasokan pangan dunia dan inflasi harga pangan.<sup>1</sup> Lebih jauh,

<sup>1</sup> Nik Martin, ‘Rusia Blokir Jalur Utama Ekspor Gandum, Pasokan Pangan Dunia Terancam’, *March 18, 2022* <<https://www.dw.com/id/rusia-disebut-blokir-jalur-perdagangan-gandum-global/a-61170522>> [accessed 21 March 2022].



pengurangan ekspor sereal dan minyak nabati dapat berimbas secara potensial pada harga pangan internasional.<sup>2</sup>

Melimpahnya kekayaan alam nusantara semata tidak cukup bagi penguatan ketahanan pangan nasional. Kepekaan pemerintah terhadap pasar pertanian merupakan satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.<sup>3</sup> Bencana pandobal (pandemi global) virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina Daratan, sejak 2019, menyebar cepat hingga ke sekitar 190 negara serta sudah mematikan lebih 5.000 orang yang terus meningkat<sup>4</sup> Untuk membendung penyebaran virus ini, beberapa hal dilakukan sejumlah negara seperti menerapkan isolasi atau karantina diri (*lockdown*) serta penjarakan sosial (*social distancing*).

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diadopsi pemerintah sejak 10 April 2020 secara bertahap. Strategi ini efisien bagi pemerintah pusat, karena tanggungjawab anggaran, logistik, sumber daya kesehatan banyak terpikul di bahu pemerintah daerah tidak di pemerintah pusat.<sup>5</sup> Selanjutnya, PSBB bertransformasi menjadi PSBB transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hingga PPKM 4 level.<sup>6</sup>

Pada tahun 2020, pemberlakuan PSBB berdampak bagi distribusi pangan di Indonesia sehingga situasi negara berada di ambang krisis pangan. Saat itu, sejumlah daerah sudah mengalami kelangkaan beras, gula, cabe, bawang dan kebutuhan pokok lainnya,<sup>7</sup> sehingga pemerintah mengusahakan subsidi silang dari daerah surplus pangan untuk disalurkan ke daerah defisit pangan.<sup>8</sup> Terjadi juga kekurangan stok

---

<sup>2</sup> Bagus Kurniawan, 'Konflik Rusia Dan Ukraina Ancaman Kelaparan Global Dan Krisis Ketahanan Pangan Dunia', *March 19, 2022* <<https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-254017219/konflik-rusia-dan-ukraina-ancaman-kelaparan-global-dan-krisis-ketahanan-pangan-dunia>> [accessed 21 March 2022].

<sup>3</sup> Henry Thomson, 'Food and Power: Agricultural Policy under Democracy and Dictatorship', *Comparative Politics*, 49.2 (January) (2017), 273–93 <<https://www.jstor.org/stable/24886201>>, h. 273.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, 'Virus Corona Stigmatisasi', *April, 17th, 2020* <<https://republika.co.id/berita/q8qilw282/virus-corona-stigmatisasi>> [accessed 29 April 2020].

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, 'Wabah Covid-19 Dan Kriminalitas', *April, 23, 2020* <<https://republika.co.id/berita/q98ji4318/wabah-covid19-dan-kriminalitas>> [accessed 29 April 2020].

<sup>6</sup> Desi Permatasari, 'Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Level 4', *July 31, 2021* <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>> [accessed 13 March 2022].

<sup>7</sup> Abdur Rahim, 'PSBB Dapat Picu Kelangkaan Pangan Di Daerah', *April, 28th, 2020* <<https://www.kompas.tv/article/78511/psbb-dapat-picu-kelangkaan-pangan-di-daerah>> [accessed 29 April 2020].

<sup>8</sup> Abdur Rahim, 'Stok Pangan Dalam Negeri Defisit, Ini Rinciannya', *April, 28th, 2020* <<https://www.kompas.tv/article/78507/stok-pangan-dalam-negeri-defisit-ini-rinciannya>> [accessed 29 April 2020].

pangan seperti beras, jagung, cabe besar, cabe rawit, bawang merah, telur ayam, gula pasir serta bawang putih di sejumlah provinsi dengan jumlah bervariasi.<sup>9</sup> Untuk menjaga pasokan pangan, pemerintah mengirim 10 ton telur dari Sumatera Utara ke Aceh, serta cabai merah dari daerah ke Jakarta. Seluruh kepala daerah juga dipastikan tetap membuka akses jalan untuk lalu lintas distribusi logistic.<sup>10</sup> Guna menghindari kriminalitas berujung revolusi sosial akibat rawan pangan, perlu penguatan solidaritas dan kohesi social.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah bergantung pada strategi menjaga kelangsungan sistem produksi di tengah keterbatasan cadangan pangan nasional.<sup>12</sup> Mengantisipasi turunnya aktivitas ekspor dan impor hingga 30% karena negara importir juga terkena Covid-19, ekspor impor menjadi kegiatan yang dikecualikan dalam pembatasan kegiatan saat PSBB sesuai pedoman yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020.<sup>13</sup>

Periode Juli 2021, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat level 4 berdampak pada petani di pedesaan dengan penurunan nilai tukar petani (NTP) sebesar 0,11% dari bulan Juni sehingga mencapai 103,48. Ini disebabkan kenaikan indeks yang diterima petani lebih kecil daripada indeks yang dibayar petani, seperti terlihat dalam table berikut.

**Tabel 01. Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP)**

Bulan			Keterangan
Juni	Juli	Fluktuasi	
Penurunan			
97,27	96,31	< 0,98%	Penurunan terutama dari jenis tanaman jagung, ketela pohon dan talas
119,25	119,10	< 0,13%	Perkebunan rakyat: penurunan pendapatan

<sup>9</sup> Rahim, 'Stok Pangan Dalam Negeri Defisit, Ini Rinciannya'.

<sup>10</sup> Caesar Akbar, 'Kementan Sebut Penerapan PSBB Hambat Distribusi Pangan', *April, 20th, 2020* <<https://bisnis.tempo.co/read/1333612/kementan-sebut-penerapan-psbb-hambat-distribusi-pangan>> [accessed 29 April 2020].

<sup>11</sup> Azra, 'Wabah Covid-19 Dan Kriminalitas'.

<sup>12</sup> Hermas E. Prabowo, 'PSBB Dan Kesiapan Stok Pangan Indonesia', *April, 12nd, 2020* <<https://kompas.id/baca/opini/2020/04/12/psbb-dan-kesiapan-stok-pangan-indonesia/>> [accessed 29 April 2020].

<sup>13</sup> Noverius Laoli, 'Kebijakan PSBB Jamin Kelangsungan Ekspor Impor, Begini Respons Importir', *April, 05th, 2020* <<https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-psbb-jamin-kelangsungan-ekspor-impor-begini-respons-importir>> [accessed 2 May 2020].

dari jenis perkebunan kelapa sawit, tebu, pinang, nila, kemiri dan kakao

Kenaikan			
98.98	101,45	> 98,98%	Komoditas yang mendorong kenaikan pada nilai NTP subsektor ini antara lain jenis sayur-sayuran seperti bawang merah, kol, kacang panjang, buncis, ketimun, cabe rawit, daun bawang, dan lainnya

Sumber: Said, 2021<sup>14</sup>

Indeks yang diterima petani (IT) menunjukkan tingkat hasil produksi petani. Indeks yang dibayar petani (IB) menunjukkan biaya yang dikeluarkan petani untuk kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 02. Indeks yang Diterima Petani (IT) Periode Juli 2021**

Item	Jumlah	Komoditas Pendorong/Penghambat
Indeks yang diterima petani (IT)	> 0.03%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejumlah komoditas yang masih berhasil mendorong kenaikan pada nilai IT, antara lain sapi potong, bawang merah, cabai rawit, karet, cabai merah, bawang daun, kol, kambing dan wortel.</li> <li>Sebaliknya beberapa komoditas yang menghambat kenaikan IT, antara lain penurunan pendapatan dari gabah, ayam ras pedaging, kelapa sawit, kentang dan telur ayam ras.</li> </ul>
Indeks yang dibayar petani (IB)	> 0,14%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kenaikan signifikan pada nilai IB didorong oleh kenaikan pengeluaran petani untuk pembelian cabai rawit, bawang merah, cabai merah, tomat sayur, ketimun, kacang panjang, rokok kretek filter, ikan tongkol, sawi hijau dan rokok kretek. Beberapa dari komoditas tersebut mengalami inflasi tertinggi sepanjang bulan Juli sebagaimana laporan BPS.</li> </ul>

<sup>14</sup> Abdul Azis Said, 'Terdampak PPKM, Kesejahteraan Petani Turun Pada Juli', *August 02*, 2021 <<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6107c035f265d/terdampak-ppkm-kesejahteraan-petani-turun-pada-juli>> [accessed 18 March 2022].

- 
- Sementara beberapa komoditas yang menghambat kenaikan nilai IB antara lain daging ayam ras, telur ayam ras dan beras.
- 

Sumber: Said, 2021

Pada tahun 2022 ini, kendati keadaan pangan baik global maupun Indonesia tampak bersahabat,<sup>15</sup> ancaman kelangkaan pangan sudah terjadi di sejumlah negara yang berimbas pada naiknya harga pangan (*food rise*). Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Selain itu, inflasi yang merangkak perlahan juga terjadi di sejumlah negara hingga di atas 50% dan di atas 30%. Di Amerika Serikat, inflasi yang biasanya tidak pernah menyentuh 1%, di bulan Maret 2022 sudah di atas 7%. Imbasnya, keinginan masyarakat untuk membeli harus membayar harga lebih tinggi. Ini disebabkan kenaikan inflasi akan memicu kenaikan harga.<sup>16</sup> Lembaga dan struktur sosial ekonomi berinteraksi untuk menghasilkan hasil kebijakan pertanian. Berbeda dengan pendekatan demokratis, pemerintah otoriter kurang responsif terhadap insentif pemilu serta kepentingan penduduk desa. Kebijakan yang diambil umumnya bias perkotaan yang menurunkan pengembalian petani.<sup>17</sup>

Indonesia sempat melakukan pendekatan politik ketahanan pangan otoriterian yang berdampak pada krisis pangan hebat di era rezim Soekarno (Orde Lama). Program swasembada beras (1956-1964) buntut penolakan impor beras untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada negara asing, gagal. Tumpang tindihnya orientasi ekonomi dengan politik kebudayaan,<sup>18</sup> memperlemah produksi sehingga diversifikasi pangan menggantikan beras mengalami stagnasi. Tahun 1963 Indonesia mengalami kelangkaan beras.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Dwi Andreas Santosa, 'Waspada Pangan Pada 2022', *March 16, 2022* <<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/16/waspada-pangan-pada-2022/>> [accessed 19 March 2022].

<sup>16</sup> Chandra Gian Asmara, 'Jokowi Wanti-Wanti Kelangkaan Pangan Hingga Inflasi Meroket', *March 01, 2022* <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220301103216-4-319131/jokowi-wanti-wanti-kelangkaan-pangan-hingga-inflasi-meroket>> [accessed 19 March 2022].

<sup>17</sup> Thomson, h. 273.

<sup>18</sup> Thee Kian Wie, 'Krisis Ekonomi Di Indonesia Pada Pertengahan 1960-an Dan Akhir 1990-an Suatu Perbandingan', in *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20*, ed. by Ben White and Peter Boomgaard (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

<sup>19</sup> Juli Panglima Saragih, 'Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17.2 (2016), 57–80 <<https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>>.

Adalah menarik, gambaran “peristiwa darurat” yang dapat mengganggu stabilitas nasional, telah lama diprediksi oleh Syafruddin Prawiranegara (1911-1989) dalam sebuah tulisannya pada tahun 1952.<sup>20</sup>

“Apabila impor barang-barang seperti semen, kertas dan lain-lain terhenti, misalnya *dalam keadaan perang*, maka pembuatan rumah, pencetakan buku-buku dan koran, dan sebagainya akan berkurang. Tetapi apabila pemasukan beras tidak dapat dilangsungkan, maka pasti akan timbul bencana kelaparan yang hebat sekali. Pendeknya, apabila kita tak perlu lagi mendatangkan beras dari luar, maka barulah kedudukan kita bisa dikatakan kuat, baik ekonomis, maupun ditinjau dari sudut pertahanan.”<sup>21</sup>

Beberapa kajian terkait ancaman kelangkaan pangan di tengah pandemic Covid 19 lebih menekankan solusi bagi kasus Covid-19 untuk saat ini atau dimensi jangka pendek (Estrada, 2020; Cullen, 2020; Omar, 2020)<sup>22</sup> serta ketahanan pangan dari sisi praktis (Saragih, 2016; Limenta & Chandra, 2017; Balié et al., 2017).<sup>23</sup> Sementara relasi invasi Rusia ke Ukraina dengan ketahanan pangan global juga dikemukakan oleh Tanchum (2022).<sup>24</sup> Adapun kajian ini akan mengorelasikan mewabahnya Covid-19 dengan stabilitas ketahanan pangan serta menawarkan solusi jangka panjang ke depan melalui gagasan orientasi politik ekonomi berbasis pangan yang dilontarkan oleh salah satu pemikir politik muslim Indonesia, Syafruddin Prawiranegara.

Atas dasar itu, makalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana upaya revitalisasi agrikultural sebagai dampak sosial dari covid-19 dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara? Peran pemerintah dengan melakukan intervensi untuk mengatasi kelangkaan pangan perlu ditindaklanjuti, di antaranya melalui kebijakan proteksi pertanian berkelanjutan. Secara skematik, kerangka konseptual yang dibangun adalah sebagai berikut.

---

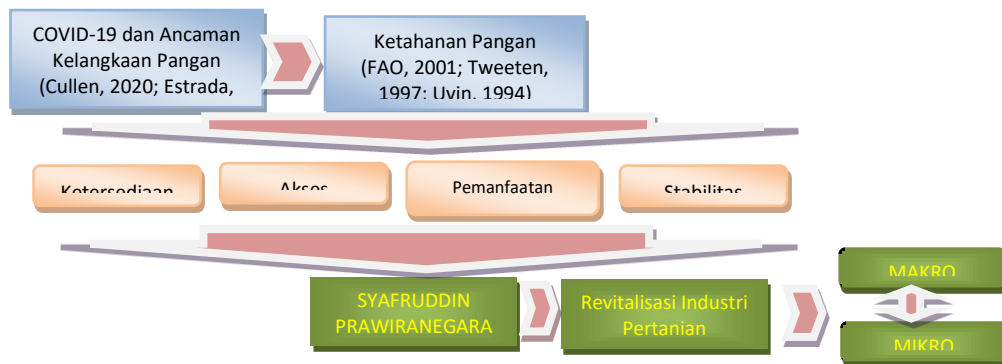
<sup>20</sup> Tulisan ini berjudul: *Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi*. Saat itu ia menjabat Presiden De Javasche Bank (1951-1952) terakhir.

<sup>21</sup> (Prawiranegara, 2011: 83-84)

<sup>22</sup> Lihat Estrada (2020); Cullen (2020); Omar (2020).

<sup>23</sup> Lihat Saragih (2016); Limenta & Chandra (2017); Balié et al. (2017).

<sup>24</sup> Michaël Tanchum, 'THE RUSSIA-UKRAINE WAR HAS TURNED EGYPT ' S FOOD CRISIS INTO AN EXISTENTIAL THREAT TO THE ECONOMY', 2022, pp. 1–6.



**Gambar 01. Kerangka Konseptual Penelitian**

## B. Menuju *Food Security*

Ketahanan pangan menyangkut kekurangan pangan, kemiskinan, dan kekurangan. Kekurangan pangan berkaitan dengan persediaan makanan yang tersedia bagi populasi dalam suatu wilayah geografis. Ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Untuk ketahanan pangan, harus ada persediaan makanan yang dapat diandalkan, dan individu harus dapat memperolehnya dan juga memperoleh kesejahteraan gizi darinya.<sup>25</sup>

Menurut FAO, ketahanan pangan: “Adalah situasi yang ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.” Definisi ini mempromosikan empat elemen utama ketahanan pangan: Akses, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Stabilitas.<sup>26</sup>

Dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik (baik itu di bidang pertanian, tanah, perikanan dan akuakultur, hutan, keamanan pangan atau perlindungan sosial dan pekerjaan), pemerintah dimotivasi oleh kekuatan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan, terutama ketika mereka dihadapkan pada persaingan ekonomi, keharusan sosial dan sistem. Selain itu,

<sup>25</sup> Lihat Uvin (1994: 1); Tweeten (1997).

<sup>26</sup> FAO, *The State of Food Insecurity in the World 2001* (Rome: FAO, 2001).



pendorong internasional dan masalah yang muncul seperti perubahan iklim, atau agenda global baru seperti Pembangunan Berkelanjutan.<sup>27</sup>

Liberalisasi perdagangan telah menjadi ciri reformasi neoliberal kapitalisme sejak 1980-an. Pada 1980-an, pertanian telah menjadi sektor ekonomi nasional yang paling berpandangan ke dalam, dan sektor pertanian nasional sangat dilindungi. Salah satu alat utama diskursif yang digunakan untuk meliberalisasi pertanian pada 1980-an adalah "ketahanan pangan," yang seharusnya paling baik dicapai melalui perdagangan daripada swasembada<sup>28</sup>.

Para ahli teori pasca-pembangunan berpendapat bahwa praktik pembangunan saat ini, khususnya dalam hal bantuan pangan dan ketahanan pangan, secara salah didepolitisasi oleh para praktisi pembangunan. Politik ketahanan pangan lebih dari sekedar mencari penyebab dan solusi untuk kelaparan. Kemiskinan, kelaparan dan ketahanan pangan adalah masalah kekuasaan di suatu negara. Akses ke aset produktif, tanah, tenaga kerja, air, dan modal dikendalikan oleh sistem hukum suku dan lokal yang kompleks, intervensi negara, dan lembaga pembangunan seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Karena kontradiksi implisit dan eksplisit ini, kelaparan dapat dilihat sebagai hasil dari proses politik yang tidak adil.<sup>29</sup>

Ketahanan pangan tetap menjadi perhatian utama di negara-negara berkembang, dan bahwa pemerintah nasional menggunakan berbagai kebijakan untuk menangani masalah keamanan pangan warga mereka. Namun, langkah-langkah dukungan pendapatan bagi kaum miskin ini hanya efisien ketika melakukan penyediaan pasokan bahan makanan pokok yang ditingkatkan. Ini menggarisbawahi pentingnya berinvestasi di sektor pertanian

---

<sup>27</sup> P. Pinstrup-Andersen, *The Political Economy of Food and Nutrition Policies*, ed. by P. Pinstrup-Andersen (IFPRI. The Johns Hopkins University Press, 1993).

<sup>28</sup> Gerardo Otero and Gabriela Pechlaner, 'The Political Economy of "Food Security" and Trade: Uneven and Combined Dependency The Political Economy of "Food Security" and Trade: Uneven and Combined Dependency', *Rural Sociology*, 78.3 (September) (2013), 263–289 <<https://doi.org/10.1111/ruso.12011>>.

<sup>29</sup> James Smith, 'Poverty, Sovereignty and Resistance in Southern Africa', *Afriche e Orienti. Rivista Ai Confini Tra Africa, Medio-Oriente e Mediterraneo*, Bologna, 2003, 2.



untuk mendorong produksi pangan.<sup>30</sup> Sinergitas para teoretisi dan praktisi sangat penting. Para praktisi menyaksikan semua praktik di lapangan yang mereka anggap merugikan ketahanan pangan yang dapat dengan mudah diperbaiki melalui perubahan politik dan peningkatan praktik pertanian.<sup>31</sup>

Semakin rendah pendapatan negara, pertanian menjadi semakin kritis, karena negara tersebut tidak memiliki cukup pendapatan untuk mengimpor makanan dan juga berinvestasi dalam teknologi dan produktivitas. Investasi internasional dalam teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan agri-pangan, juga menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, bergerak, merampingkan dan mengarahkan pengaruh pada ekonomi, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>32</sup> Kehilangan makanan secara substansial dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi praktik pertanian melalui pembelajaran dari komersial skala besar dan sektor pertanian organik skala kecil.<sup>33</sup>

### C. Reformasi Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Di saat krisis pandemic Covid-19, Untuk menghindari kekurangan pangan, sangat penting bahwa negara-negara menjaga rantai pasokan makanan tetap berjalan. Berbeda dengan krisis pangan global 2007-2008, kelangkaan tidak menjadi masalah saat ini. Pasokan komoditas pokok berfungsi dengan baik, dan hasil panen perlu diangkut ke tempat yang paling dibutuhkan. Membatasi perdagangan tidak hanya tidak perlu, itu akan merugikan produsen dan konsumen dan bahkan membuat kepanikan di pasar. Untuk komoditas bernilai tinggi yang membutuhkan pekerja (alih-alih mesin) untuk produksi, negara harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga

---

<sup>30</sup> Katarzyna Boratyńska and Raqif Tofiq Huseynov, 'An Innovative Approach to Food Security Policy in Developing Countries', *Journal of Innovation and Knowledge*, 2.1 (2017), 39–44 <<https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.007>>.

<sup>31</sup> Lauren Karplus, 'ISU ReD : Research and EData Post-Development Theory and Food Security : A Case Study in Swaziland Advisor : Professor Noha Shawki', 2014.

<sup>32</sup> Leidy Diana and others, 'Public Policies for Food Security in Countries with Different Development Levels', *International Public Management Review*, 11.3 (2010), 122–41.

<sup>33</sup> Rafael Pérez-Escamilla, 'Food Security and the 2015–2030 Sustainable Development Goals: From Human to Planetary Health', *Current Developments in Nutrition*, 1.7 (2017), e000513 <<https://doi.org/10.3945/cdn.117.000513>>.

produksi berjalan dan kebutuhan untuk melindungi pekerja. Ketika negara-negara memerangi pandemi coronavirus, mereka juga harus melakukan segala upaya untuk menjaga persneling rantai pasokan makanan mereka.<sup>34</sup>

Meskipun masih dini untuk menilai dampak penuh krisis COVID-19 pada ketahanan pangan, ada sinyal yang mengkhawatirkan terkait aksesibilitas dan ketersediaan pangan, terutama untuk populasi yang rentan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Ketahanan pangan harus dipertimbangkan secara serius dalam menangani krisis COVID-19. Sebagai contoh, 11% rumah tangga A.S adalah rawan pangan sebelum krisis ini. Persentase ini diperkirakan akan meningkat dan akan mencakup rumah tangga berpendapatan rendah jika tindakan yang tepat tidak diambil. Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan dampak perlambatan ekonomi global terhadap kemiskinan di seluruh dunia. Menurut model ini, perlambatan ekonomi 1% akan meningkatkan kemiskinan di seluruh dunia sebesar 2%. Sebagai akibatnya, di tingkat global, jumlah penduduk miskin akan meningkat sebanyak 14 juta orang, dengan daerah pedesaan yang terkena dampaknya terutama. Dampaknya tentu saja akan tergantung pada durasi krisis dan perkembangan pandemi, tetapi IFPRI mensimulasikan skenario di bawah hipotesis tertentu. Menurut hipotesis ini, hanya kegiatan nasional yang akan lumpuh dan saluran perdagangan global tidak terganggu.<sup>35</sup>

Sementara itu mengacu Pasal 3 UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Maka konsep kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan merupakan satu kesatuan yang terintegratif dalam penyelenggaraan pangan.

---

<sup>34</sup> Cullen.

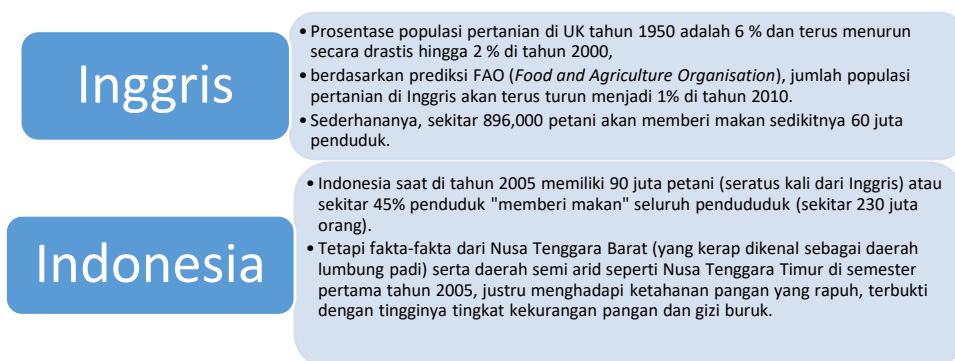
<sup>35</sup> Omar.

Seiring teradaptasinya pandemi Covid 19 dalam kehidupan global, pemerintah menggagas sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga rantai ketahanan pangan nasional, seperti terlihat dalam gambar berikut.



**Gambar 02. Kebijakan Pangan Nasional di Tengah Pandemi Covid 19<sup>36</sup>**

Dalam penemuan dunia modern, terdapat paradox dalam ketahanan pangan (*food security*). Kenyataannya, dunia hari ini lebih aman pangan ketimbang masa lalu meski secara prosentase, lebih banyak produsen pangan di masa lalu ketimbang masa kini. Secara manifestatif, paradox ini terlihat dari komparasi pertanian di Inggris dan Indonesia berikut.



<sup>36</sup> Haryo Limanseto, 'Strategi Pemerintah Mendorong Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani', *June 03, 2021* <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3044/strategi-pemerintah-mendorong-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-petani>> [accessed 19 March 2022].

### **Gambar 03. Paradoks Perkembangan Pertanian antara Inggris dan Indonesia** <sup>37</sup>

Dengan demikian, untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek masih diperlukan: (a) kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor produk pertanian namun hendaknya didukung pula dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas produk pertanian nasional; (b) untuk daerah penghasil pertanian lainnya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian.

Untuk jangka panjang: (a) kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan peningkatan Ketahanan Pangan Domestik/Lokal; (b) Pengembangan teknologi pertanian juga di harapkan mampu meningkatkan dan mengefisienkan sektor pertanian; (c) Diversifikasi Produksi Pangan dengan cara penganeka-ragaman konsumsi atau pangan dapat mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras; (d) Konsekuensinya, keanekaragaman ketersediaan bahan pangan perlu ditingkatkan pula dengan didukung agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh dimana saja dan ditunjang dengan pola konsumsi masyarakat; (e) Peranan Badan Litbang Pertanian pun juga di tuntutan untuk memberikan terobosan baru kepada para pelaku di sector agribisnis yang akan membawa kemajuan dan pewujudan ketahanan pangan nasional <sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Jonathan A. Lassa, 'Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005', 2005 <<https://doi.org/10.1080/17499510802369140>>.

<sup>38</sup> Rossi Prabowo, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia', *Mediagro*, 6.2 (2010), 62–73.

#### **D. Pembangunan Industri dan Pertanian: Syafruddin, di antara Hatta dan Soemitro**

Dalam peta politik ekonomi Indonesia, Syafruddin Prawiranegara memiliki posisi distinktif, terutama jika dibandingkan dengan para peletak dasar ekonomi Indonesia pada masa awal terbentuknya negara ini. Sebagai salah satu peletak dasar ekonomi nasional, kedudukannya sering disandingkan dengan Mohammad Hatta (1902-1980), Soemitro Djojohadikoesoemo (1917-2001). Di bidang pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi, pemikiran Pak Syaf, pada dasarnya dikemukakan pada level ekonomi politik dan kebijaksanaan pembangunan yang didasarkan pandangan ideologis yang berkembang sejak awal abad ke-20 yakni Islam, Sosialisme dan Nasionalisme.<sup>39</sup>

Ia lahir di Banten tanggal 29 Februari 1911 dari ayah seorang *ménak* Sunda dan ibu berdarah Minangkabau. Pengalamannya bekerja di Kementerian Keuangan telah membentuknya menjadi seorang ekonom. Dari pengalaman ini, ia memperoleh pengetahuan mengenai sejumlah permasalahan fiskal. Terutama mengenai peranan perusahaan dan perorangan yang berpendapatan tinggi sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak. Pemikiran ekonominya berpihak kepada dunia usaha sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai teknokrat, jasa terbesarnya menurut para Indonesianis adalah sebagai penjaga stabilitas moneter dan pengendali tingkat inflasi yang ditunjukkannya saat ia memimpin bank sentral.<sup>40</sup>

Beberapa peletak dasar ekonomi Indonesia pada masa awal di antaranya Mohammad Hatta, Soemitro Djojohadikoesoemo dan Syafruddin Prawiranegara. Hatta memiliki gagasan mengenai koperasi dan transformasi perekonomian, yaitu transformasi dari perekonomian colonial yang berorientasi kepada pasar internasional menjadi perekonomian nasional yang mandiri berbasis perekonomian domestic. Sementara Soemitro melandaskan pemikirannya pada nasionalisasi perekonomian dan industrialisasi yang digerakkan oleh perusahaan negara dan pengusaha pribumi. Adapun Syafruddin, gagasannya berorientasi pada pandangan monetaris, bahwa industrialisasi harus didasarkan pada stabilitas moneter dan pembangunan pertanian, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun untuk menghasilkan devisa<sup>41</sup>.

Jika dilihat dari peran dan pemikirannya di masa Orde Baru, Soemitro adalah seorang nasionalis dalam menerjemahkan berbagai gagasan ekonominya. Sebagai

---

<sup>39</sup> (Rahardjo, 2011: 59).

<sup>40</sup> (Rahardjo, 2011: 70, 72).

<sup>41</sup> Rahardjo (2011: 73).

konsekuensi, baginya, negara harus memainkan peran besar dalam membentuk struktur ekonomi, sebagai alternative dari ekonomi colonial. Menyadari absennya kelas industrialis di dalam susunan masyarakat Indonesia yang baru merdeka, dengan memanfaatkan otoritas politik negara, ia berusaha melakukan industrialisasi yang memproduksi barang-barang pengganti impor (*import substitution industrialization*). Tujuannya, guna menciptakan kemandirian ekonomi dalam rangka menghilangkan ketergantungan perdagangan.

Berseberangan dengan Soemitro, dan juga Hatta dalam besarnya porsi negara dalam perekonomian, Syafruddin secara ekonomi berpandangan lebih liberal. Di mana ia menekankan kerja manusia sebagai sumber. Prinsip ini bekerja pada manifestasi di mana jika tiap-tiap individu diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk melakukan kerja produktif guna memenuhi kepentingan dirinya sendiri, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan tercapai. Kecenderungan Syafruddin ini konsisten ia utarakan baik di tahun 1948 maupun 1966 berpegang pada kesangsian pada sistem perencanaan ekonomi.<sup>42</sup>

Kebanyakan pemimpin Indonesia menyetujui pandangan Soemitro mengenai perlunya industrialisasi. Namun, Syafruddin lebih memprioritaskan pengembangan pertanian. Ia berpendapat bahwa industri manufaktur harus dilandasi pertanian dan sumberdaya alam Indonesia. Akan sulit membangun sektor industri manufaktur apabila sektor pertanian masih kurang berkembang. Lagipula, orang Indonesia harus lebih dulu mendapat pendidikan manajemen dan teknologi sebelum memasuki industrialisasi yang dipaksakan.<sup>43</sup>

Kendati demikian, tak selamanya Syafruddin berbeda pendapat dengan Soemitro. Pada masa revolusi, pandangan yang dominan adalah nasionalisasi perekonomian Indonesia yang mencapai puncak pada tahun 1957 ketika dilakukan kebijakan nasionalisasi yang radikal. Syafruddin, berdasarkan analisis ekonominya sepemahaman dengan Soemitro dalam mengkritik pandangan ini. Dalam kedudukannya sebagai seorang ekonom, Syafruddin di mata Dawam Rahardjo,<sup>44</sup> dipandang lebih murni daripada Soemitro, karena Soemitro, kendati tidak dogmatis, masih berpikir dalam kerangka Nasionalisme dan Sosialisme.

---

<sup>42</sup> Rahardjo (1987: 93); Ali (2011: 45).

<sup>43</sup> Prawiranegara (1987); Wie (2005: xxxix)

<sup>44</sup> Rahardjo (2011: 193)

Pemikiran Syafruddin sering bertumpu pada logika dengan argumen yang persuasif sehingga ia lebih mampu melihat persoalan secara komprehensif baik dari sudut pandang agama, politik, hukum, ekonomi maupun kultural.<sup>45</sup>

#### E. Analisis dan Temuan

Kebijakan ketahanan pangan di negara berkembang biasanya melibatkan intervensi langsung yang melibatkan perubahan struktural dalam harga relatif dan subsidi pangan yang ditargetkan, serta langkah-langkah tidak langsung seperti meningkatkan infrastruktur pertanian dan lingkungan ekonomi secara umum, dan memberi petani teknologi pertanian baru untuk meningkatkan produksi makanan. Sejauh memastikan ketahanan pangan juga melibatkan langkah-langkah yang merangsang tingkat permintaan efektif yang memadai melalui "hak," pemerintah juga telah menggunakan strategi diversifikasi pendapatan dan transfer tunai untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Namun, langkah-langkah dukungan pendapatan bagi masyarakat miskin ini hanya efisien ketika penyediaan dibuat untuk pasokan komoditas makanan pokok yang diperbesar. Ini menggarisbawahi pentingnya berinvestasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan<sup>46</sup>.

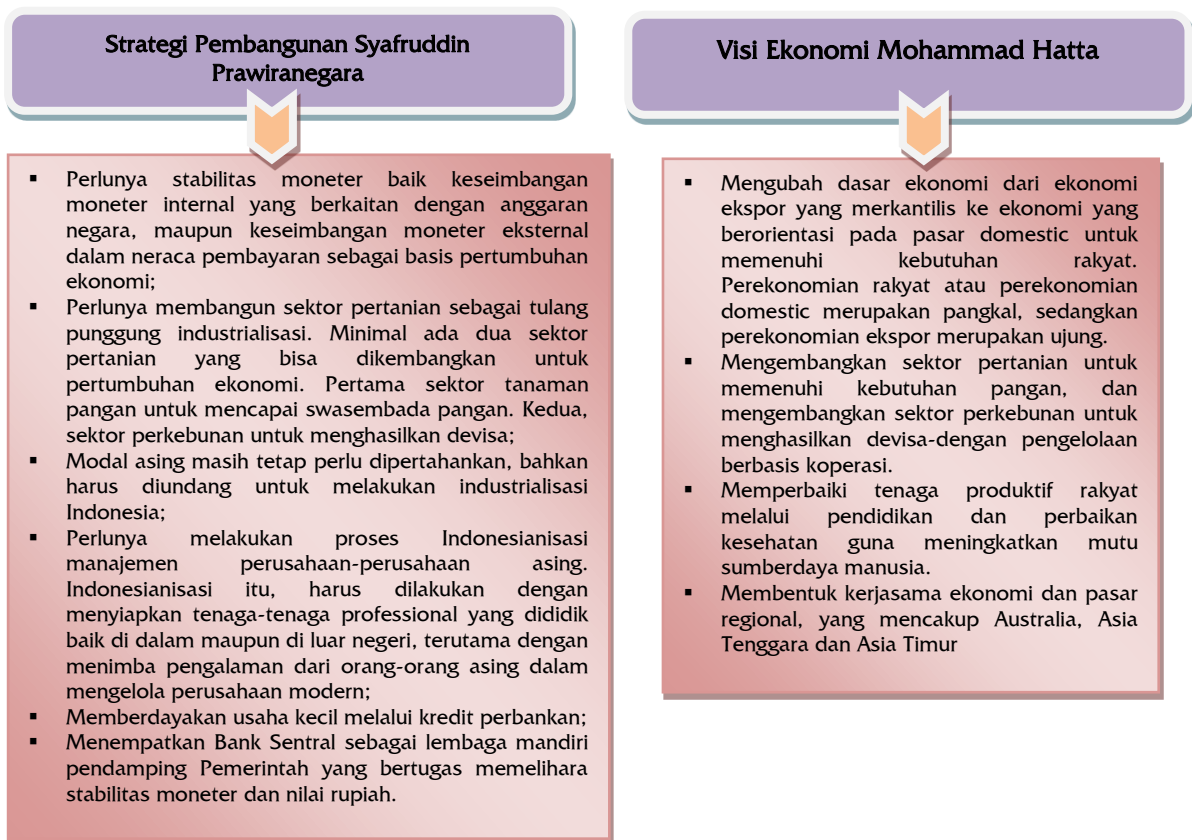
Karir Syafruddin di pemerintahan mencapai puncak saat ia menjabat Menteri Keuangan dan kemudian Gubernur Bank Sentral pada awal dasawarsa 1950-an. Saat itu ia menyampaikan gagasan mengenai strategi pembangunan pada awal perkembangannya. Beberapa di antaranya sangat relevan dengan ide Hatta seperti tercermin dalam gambar berikut:

---

<sup>45</sup> Hasan Mustapa and M.A. Syi'aruddin, 'Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3.1 (2020), 133–52 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1721>>, h. 133.

<sup>46</sup> Awudu Abdulai and Christian Kuhlitz, *Food Security Policy in Developing Countries*, *The Oxford Handbook of the Economics of Food Consumption and Policy*, 2012 <<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199569441.013.0014>>.





**Gambar 2. Relevansi Gagasan Syafruddin dengan Mohammad Hatta<sup>47</sup>**

Adalah menarik melihat tekanan Syafruddin dan Hatta terhadap sector pertanian. Jika Syafruddin menghendaki pertanian sebagai tulang punggung industrialisasi, terutama tanaman pangan untuk swasembada pangan serta perkebunan untuk devisa, maka Hatta menambahkan, untuk mengayomi kedua sector tersebut difasilitasi dengan penguatan sector koperasi.

Dalam beberapa aspek, untuk mengatasi problema dalam ranah kehidupan, termasuk di bidang perekonomian dan pertanian, Syafruddin Prawiranegara (1911-1989), mantan politisi Masyumi, sering melandaskan pemikirannya pada sumber normatif Al-Qur'an dan Hadits.<sup>48</sup> Perspektif

<sup>47</sup> Rahardjo (2011: 72; 110).

<sup>48</sup> Hasan Mustapa, 'REAKTUALISASI PEMIKIRAN KEAGAMAAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1988)', *Indo-Islamika*, 2.Juli-Desember (2017), 145–70 <<https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14820>>, h. 145.

Syafruddin Prawiranegara tentang pentingnya industri pertanian guna optimalisasi produksi pangan adalah sebagai berikut.

## **F. Ketersediaan**

Pertanian negara tidak hanya harus menyediakan lebih banyak makanan, tetapi juga meningkatkan kualitas makanan. Ini penting dalam menghadapi kondisi terburuk akibat perubahan iklim (kekeringan, banjir), berkurangnya ketersediaan air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, tanaman baru dan penyakit hewan, meningkatnya spekulasi tentang pasar sumber daya pertanian, meningkatnya disproporsi dalam tingkat pertumbuhan populasi alami pada skala global dan meningkatnya kebutuhan konsumen di bidang keamanan pangan dan keamanan pangan<sup>49</sup>. Dalam konteks ini ancaman kelangkaan pangan akibat Covid-19.

Pembuat kebijakan Indonesia, seperti yang ada di banyak negara berkembang lainnya, cenderung menyamakan ketahanan pangan dengan swasembada. Untuk mengejar kebijakan swasembada, pemerintah Indonesia sering menggunakan pembatasan impor dan membangun hambatan perdagangan terhadap impor makanan seperti ukuran non-tarif seperti kuota impor dan lisensi impor non-otomatis. Langkah ini diambil guna melindungi dan mengisolasi produksi pertanian domestik yang kurang efisien dan kompetitif, yang harus disubsidi dari dana publik agar dapat bertahan. Padahal, kebijakan proteksionis seperti ini mungkin kontraproduktif dalam upaya Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan karena justru dapat meningkatkan biaya makanan dan membebankan beban ekonomi tambahan pada konsumen. Sehingga pengeluaran orang miskin untuk kebutuhan pokok relatif lebih besar dari pendapatan mereka.<sup>50</sup>

## **G. Membangun Industri Pertanian Berdaya Saing**

Sebagai negawaran yang berpandangan ke depan,<sup>51</sup> Syafruddin beropini, seandainya pemerintah tidak sanggup membangun industri dengan

---

<sup>49</sup> Mariola Kwasek, 'Threats To Food Security and Common Agricultural Policy', *Economics of Agriculture*, 59.4 (2013), 701–13.

<sup>50</sup> Michelle Engel Limenta and Sianti Chandra, 'Indonesian Food Security Policy', *Indonesia Law Review*, 7.2 (2017), 245–65 <<https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.198>>.

<sup>51</sup> Azyumardi Azra, 'Negarawan Progresif', in *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara: Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017), pp. ix–xi.

komoditas yang dapat bersaing dengan produk asing, maka itu berarti bahwa kita memaksa konsumen (rakyat umum) membeli barang yang lebih mahal, sedangkan barang yang lebih murah dan mungkin lebih baik, bisa didapat dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengimpornya. Ia mencontohkan, di Argentina, industri dibangun begitu cepat dan terburu-buru sehingga justru merusak perekonomian. Ketergesa-gesaan membangun industri menjadi tidak efisien, tidak sanggup bersaing dengan industri luar negeri serta mengorbankan pertanian dan peternakan. Dua sektor Argentina yang semula sangat subur dan luas tersebut, sangat merosot karena kekurangan tenaga, yang tertarik oleh upah-upah yang tinggi, mengalir ke kota-kota besar mencari pekerjaan di lapangan industri. Bahkan, negara yang sempat termasyhur karena ternaknya ini, pernah menggalakan gerakan “hari tanpa daging”.<sup>52</sup>

Syafruddin menilai, investasi hendaknya diarahkan pada sektor yang banyak diimpor terutama keperluan masyarakat pokok. Idealnya, barang-barang yang hendak dihasilkan itu mesti terdiri dari bahan-bahan yang banyak terdapat di negeri kita sendiri, atau, kalau belum ada, mudah dapat dihasilkan di Indonesia, melihat keadaan iklim tanah dan sebagainya. Karenanya, menurut urgensi dan prioritas, bahwa di atas segala usaha yang perlu dan dapat dikerjakan karena memenuhi segala syarat di atas ialah produksi beras.

Beras merupakan bahan makanan yang terpenting bagi rakyat Indonesia. Jangan bicara dulu tentang industrialisasi, sebelum kita membicarakan produksi beras yang menjadi dasar bagi kehidupan rakyat.<sup>53</sup> Untuk menghasilkan beras tidak perlu menunggu kedatangan mesin dari luar negeri. Yang terutama diperlukan hanyalah tenaga dan alam. Kedua-duanya ada dalam jumlah yang boleh dikatakan tidak terbatas. Satu-satunya mesin yang dibutuhkan ialah cangkul. Syukur kalau ada kerbau atau sapi untuk membantu tenaga manusia. Sejak zaman purbakala, produksi beras memberi lapangan pekerjaan kepada tiap-tiap orang di desa, dan sejak zaman dahulu, beras merupakan bahan makanan yang terpenting bagi bangsa Indonesia. Dengan

---

<sup>52</sup> Prawiranegara (1952); Prawiranegara (2011: 78).

<sup>53</sup> Prawiranegara (2011: 80).

demikian, produksi beras merupakan cabang usaha bangsa kita yang dikuasai dan dikerjakan sejak zaman dahulu.

#### **H. Swasembada Pangan**

Syafruddin mengingatkan bahwa terjadi ironi di era colonial dan di masa pra colonial Belanda. Di zaman colonial, bangsa pemerintah Hindia Belanda sanggup menghasilkan beras begitu banyak, sehingga sejak tahun 1940 Indonesia praktis *self supporting* dalam soal beras. Meskipun tiap tahun penduduknya bertambah banyak. Tetapi, sejak kemerdekaan sebulat-bulatnya di tangan bangsa sendiri, untuk keperluan sendiri pun pemerintah harus mengimpor beras beratus-ratus ribu ton setahun. Dan tiap tahun impor beras itu bukan berkurang, bahkan bertambah.

Dalam sebuah tulisannya berjudul, "Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi tahun 1952, ia mengingatkan pentingnya sinergi pendapatan nasional dengan kebijakan pangan produktif. Jika pendapatan nasional benar-benar hanya Rp. 30 milyar setahun, maka berdasar atas harga barang keperluan sehari-hari, untuk investasi paling banyak bisa disediakan uang sejumlah Rp. 1,5 milyar. Dengan demikian terjadi ketidakseimbangan di mana banyaknya tambahan jiwa tiap-tiap tahun dan sedikitnya uang yang disediakan buat investasi atau penanaman modal dalam usaha-usaha yang produktif.<sup>54</sup>

Pentingnya industri pertanian serta swasembada pangan sesuai dengan kenyataan bahwa untuk ketahanan pangan, harus ada persediaan makanan yang dapat diandalkan, dan individu harus dapat memperolehnya dan juga memperoleh kesejahteraan gizi darinya.<sup>55</sup>

#### **I. Akses**

Khusus nasional dan regional dalam hal lingkungan bisnis, infrastruktur, kemampuan dan fitur dalam pengaturan produksi, kondisi sosial yang tersedia, keberlanjutan politik, dan banyak parameter lain terlibat dalam proses

---

<sup>54</sup> Prawiranegara (2011: 79); Syafruddin Prawiranegara, 'Herorientasi Di Lapangan Pembangunan Ekonomi', *Suara Partai Masjumi*, VII.4 (April) (1952).

<sup>55</sup> Uvin (1994: 1); Tweeken (1997).

harmonisasi yang terkait dengan pengembangan di kompleks agroindustri. Kebijakan penetapan harga dengan cara ini diperingkatkan di antara yang pertama. Kontrol dan penekanannya oleh pemerintah (untuk mengurangi fluktuasi harga domestik) telah lama berada di antara tugas-tugas penting baik bagi negara berkembang maupun negara maju.<sup>56</sup>

#### J. Kredit Petani untuk Menghindari Renternir

Salah satu kendala yang dihadapi para petani ialah modal dan akses pasar. Hambatan teknis ini seringkali membuat para petani terjebak dalam jerat tukang ijon. Sebagai sosok yang memiliki komunikasi politik luwes<sup>57</sup>, Syafruddin beranggapan bahwa sikap pemerintah kurang memihak terhadap pertanian serta kerajinan dan perindustrian rakyat. Uang yang diperkenankan guna kepentingan pertanian dan kerajinan rakyat itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan misalnya buat sektor impor. Andaikata pemerintah untuk kepentingan impor menyediakan kredit jauh melebihi Rp. 100 juta, maka uang Rp. 50 juta yang dipergunakan buat perkreditan untuk memberantas ijon tidak ada apa-apanya. Memang, uang yang dikeluarkan buat kepentingan petani, langsung atau tidak langsung merupakan jumlah yang lebih besar. Tetapi andaikata jumlah yang dikeluarkan untuk golongan tani yang berjuta-juta manusia itu banyaknya, adalah sebesar Rp. 200 juta misalnya, maka sebenarnya jumlah itu masih kurang apabila dibandingkan dengan kredit yang disediakan hanya untuk beberapa ratus kaum importer Indonesia itu<sup>58</sup>.

Pemerintah terlalu condong kepada perusahaan baru dan besar meski mereka *new comer* yang tidak mempunyai modal dan pengalaman tetapi kurang perhatian terhadap rehabilitasi usaha-usaha kecil tapi primer seperti pertanian rakyat, yang telah rusak akibat perang. Sikap royal terhadap para

---

<sup>56</sup> Evgeny A. Kuzmin, 'Sustainable Food Security: Floating Balance of Markets', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6.1 (2016), 37–44.

<sup>57</sup> Andi Faisal Bakti, 'Komunikasi Politik Islam "Sang Presiden Yang Terlupakan"', in *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara: Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017), pp. xiii–xvi.

<sup>58</sup> (Prawiranegara, 2011: 120)

petani dan pengusaha kecil ini adalah pada tempatnya, guna mencegah mereka jatuh ke tangan tukang ijon<sup>59</sup>.

#### **K. Koperasi Untuk Penciptaan Modal dan Akses Pasar**

Golongan tani, dalam pandangan Syafruddin, pada umumnya terdiri dari orang-orang miskin, senantiasa berada dalam kedudukan yang lemah terhadap golongan lain, misalnya pedagang-pedagang yang lebih banyak modal dan pengetahuannya tentang pasar. Dengan demikian, para petani selalu menjual barangnya dengan harga murah, sedangkan para pedagang mendapat keuntungan jauh lebih besar dalam pertukaran barang (*ruilverkeer*). Kelemahan dalam dasar pertukaran itu hanya dapat diatasi dengan organisasi yang baik, terutama koperasi yang memberi pula kemungkinan bagi pembentukan modal sedikit demi sedikit<sup>60</sup>.

Pemberian kredit rakyat untuk petani serta menggalakan kembali koperasi pertanian di tingkat desa dapat memotong saluran distribusi pasar yang birokratis feodalistik yang dikuasai segelintir orang. Kepedulian pemerintah yang lebih di masa krisis kepada petani mencirikan sinergitas tuntutan berbagai kelompok pemangku kepentingan<sup>61</sup>.

#### **L. Pemanfaatan Pangan**

Kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada kemakmuran rakyat. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yang terhindar sejauh mungkin dari birokrasi yang korup dan berbagai mismanajemen yang menguntungkan sebagian pihak tapi mengorbankan rakyat secara umum<sup>62</sup>. Dalam konteks ini, kebijakan politik pangan harus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

##### **A. Mengevaluasi Kembali Kebijakan Impor beras**

---

<sup>59</sup> Prawiranegara, *Ekonomi Dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam: Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2*.

<sup>60</sup> (Prawiranegara, 2011: 137)

<sup>61</sup> Pinstrup-Andersen.

<sup>62</sup> Hasan Mustapa and others, 'Good Governance and Corruption in the View of Syafruddin Prawiranegara (1911-1989)', 24.04 (2020), 5336–50 <<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>>.

Pemerintah seharusnya berorientasi memproduksi beras dan mengekspornya. Bukan justru banyak mengimpor beras. Baginya, adalah sebuah kesalahan jika pemerintah terlalu mempersoalkan kemungkinan mengimpor dan membeli beras, daripada menghasilkan beras. Sayangnya, perhatian pemerintah lebih banyak tertarik akan soal-soal industry, seperti pembuatan tekstil, semen, kertas, kapal dan sebagainya, daripada memberi prioritas tertinggi kepada penghasilan beras itu.

Kesalahan fundamental yang dibuat rata-rata pemimpin Indonesia ialah bahwa mereka dalam alam pikirannya, memandang produksi beras itu bukan sebagai industry, melainkan sebagai suatu usaha di luar industry. Hal ini karena orang salah memahami makna industry. Industry sering diidentikkan dengan industry masinal, industry dengan mesin. Padahal sejatinya, industry adalah kerajinan, kegiatan. Sehingga seharusnya tak mungkin kita menempatkan produksi beras itu di samping atau di bawah industry nasional<sup>63</sup>. Kebijakan menempatkan produksi beras dan cabang-cabang usaha pertanian lainnya di samping bahkan di bawah industry masinal karena lupa bahwa tiap usaha produktif, tidak semestinya diukur nilainya menurut bekerja dengan mesin atau tidak, melainkan menurut kebutuhan masyarakat dan keadaan tempat dan waktu.

Konsekuensinya, dalam tahun 1952, dua tahun setelah merdeka, impor beras bukan berkurang, bahkan lebih banyak lagi daripada di tahun-tahun yang lampau. Impor beras tahun 1952 berjumlah 600.000 ton. Dengan harga pokok rata-rata Rp. 2,00 sekilo, berarti harus membeli beras di luar negeri seharga Rp. 1.200 juta. Padahal uang yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan beras sebanyak itu di Indonesia sendiri, sehingga tidak perlu lagi bergantung dari impor, yang tidak seberapa banyaknya, kalau dibandingkan dengan uang yang dibutuhkan untuk mendirikan berbagai industry masinal, seperti industry tekstil, semen, kertas dan lainnya<sup>6465</sup>.

---

<sup>63</sup> (Prawiranegara, 2011: 81)

<sup>64</sup> (Prawiranegara, 1952;

<sup>65</sup> Prawiranegara, 2011: 82)





### M. Strategi Revitalisasi Industri Pertanian.

Syafruddin mencoba mengurai dua alternative jalan untuk melakukan revitalisasi industri pertanian, yakni: (a) Upaya diversifikasi lahan guna membuka areal persawahan baru, dan (b) Rehabilitasi irigasi. Terkait diversifikasi lahan, ia mengilustrasikan perbandingan pendirian sebuah pabrik semen dengan pembuatan persawahan baru sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Pendirian Pabrik dengan Perluasan Sawah Baru**

Perbandingan		Pabrik Semen	Industri Pertanian
Anggaran	Modal	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk sebuah pabrik semen seperti semen Padang, diperlukan lebih kurang Rp. 120 juta.</li><li>▪ Uang buat mendirikan pabrik semen buat sebagian besar dipergunakan untuk membeli mesin dan bukan guna membayar upah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perencanaan penghasilan beras untuk Sumatera Timur dan Kalimantan. Di daerah-daerah yang luas sekali, yang sekarang merupakan rawa, dengan cara inpoldering, dapat disiapkan sawah, menurut Kemen Pertanian, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ribu ha luasnya.</li><li>▪ Ongkos untuk mengeringkan rawa-rawa itu hingga dapat digunakan menjadi sawah, berjumlah kisaran Rp. 1.000,00 – Rp. 2.000,00 per ha, kalau luas tanah yang dikeringkan itu tidak terlampau kecil.</li><li>▪ Dengan uang Rp. 120 juta yang diperlukan untuk mendirikan sebuah pabrik semen, pemerintah dapat</li></ul>

		menyiapkan paling sedikit 60.0000 ha sawah.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendemen dari uang yang ditanam dalam sawah-sawah itu lebih besar daripada jika dipergunakan untuk mendirikan pabrik semen</li> </ul>
Proyeksi Kapabilitas	Direncanakan dapat menghasilkan kira-kira 200.000 ton semen setahun, cukup meniadakan impor.	Dengan hasil rata-rata 20 kwintal padi per ha, maka 60.000 ha sawah itu dapat menghasilkan 120.000 ton padi
Profitabilitas	Dengan harga lebih kurang Rp. 500,00 per ton, pabrik semen itu sesudah siap, dapat memproduksi semen seharga sekitar Rp. 100 juta. Ini merupakan investasi lumayan terlebih bahan-bahan untuk membuat semen ada di Indonesia, tidak perlu mengimpor.	Kurang lebih 60.000 ton beras, dengan harga kurang lebih Rp. 120 juta, jika 1 kg beras harganya Rp. 2,00.
Daya Serap Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meski pabrik dapat menampung paling banyak 300-400 orang, jika ditinjau dari sudut <i>werkverschaffing</i>, penempatan tenaga kerja, pabrik semen itu tak seberapa artinya.</li> <li>▪ Seandainya beberapa ratus buruh di</li> </ul>	Seandainya sawah-sawah itu dibagikan dalam potongan 2 ha kepada seorang kepala keluarga, maka akhirnya tanah pertanian baru itu

	<p>pabrik, dapat dipekerjakan pula beberapa ratus orang di luar pabrik untuk menggali bahan-bahan untuk semen, jumlah orang yang mendapat pekerjaan baru tidak seberapa banyaknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industry memang memberi upah-upah pada umumnya jauh lebih tinggi dari hasil atau upah pertanian rakyat, tetapi yang menikmati hanya beberapa ribu kaum buruh saja.</li> </ul>	<p>memberi lapangan hidup kepada 30.000 kepala keluarga atau kepada kira-kira 100.000 orang. Jika tiap-tiap kepala keluarga dihitung menurut 3-4 jiwa.</p>
Keuntungan	Keuntungan yang terpenting ialah, dengan adanya pabrik semen dapat mengurangi pengeluaran devisa yang berarti meringankan ekspor negara.	<p>Produksi beras merupakan investasi paling murah, memberi lapangan pekerjaan paling banyak, dapat dikatakan tidak memerlukan para ahli luar negeri, kecuali buat inpoldering dan membuat sejumlah saluran dam buat pengairan juga menghemat pemakaian devisa yang paling besar.</p>

Sumber: Prawiranegara (1952)<sup>66</sup>

Jika dikomparasikan dengan pembangunan pabrik lain seperti tekstil atau kapal besi dengan bahan pembuatan diimpor, maka pembukaan lahan baru atau perbaikan tanah dan sawah untuk memperbesar produksi bahan makanan, saat itu (tahun 1950-an) merupakan industry yang paling sesuai dengan keadaan dan keperluan bangsa saat itu.

<sup>66</sup> Prawiranegara (2011: 82-83); Prawiranegara, 'Herorientasi Di Lapangan Pembangunan Ekonomi'.

Sementara berkenaan dengan rehabilitasi irigasi, mantan Gubernur Bank Indonesia pertama ini mengatakan bahwa upaya membuka sawah-sawah baru memakan waktu lama. Untuk menyiapkan lahan persawahan baru di Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 275.000 ha, diperlukan waktu lebih dari tiga puluh tahun. Paling dapat disingkat menjadi dua puluh tahun. Tapi mustahil bisa diperpendek sampai dua atau tiga tahun. Untuk itu bisa diambil alternative kedua, yakni rehabilitasi irigasi. Dengan mengadakan rehabilitasi (perbaikan) saluran-saluran air, mempergunakan rabuk--yang sayang sekali harus didatangkan dari luar negeri--memperbaiki cara-cara menanam, mempergunakan benih, yang sesuai dengan keadaan daerah dan sebagainya, memerlukan modal lebih kecil dan dalam waktu lebih pendek, mencapai hasil lebih besar.

Sebagai perbandingan, untuk Kalimantan jika membuka sawah baru seluas 275.000 ha diperlukan dana Rp. 275 juta, maka untuk memperbaiki sawah-sawah atau subak-subak yang sudah ada, yang luasnya sekitar 225.000 ha, estimasi membutuhkan Rp. 70 juta. Dengan waktu yang bisa lebih singkat daripada membuat sawah atau subak baru. Di tahun 1950-an, masih banyak daerah di Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lain yang sebelum perang merupakan gudang padi, tetapi kurang menghasilkan padi, seringkali disebabkan saluran irigasi yang rusak dan tidak terpelihara akibat perang dan revolusi.

Rencana rehabilitasi seringkali ditangguhkan seperti di Aceh, Sumatera Tengah dan lainnya akibat kekurangan tenaga atau menunggu kedatangan mesin, bulldozer, traktor dan sebagainya. Jika Avros (*Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* atau Asosiasi Pemilik Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra yang dibangun pada 1918-1919), dengan bantuan pemerintah dalam tahun 1951 dapat mendatangkan para pekerja sebanyak 9.000 orang untuk dipekerjakan di perkebunan, mengapa

pemerintah tidak sanggup mendatangkan puluhan ribu kaum buruh dari Jawa untuk memperbaiki jalan-jalan dan irigasi.<sup>67</sup>

Menurut Syafruddin, untuk merealisasikan ide revitalisasi industri pertanian diperlukan waktu kurang lebih sepuluh tahun. Itu pun seandainya bangsa ini siap untuk menunggu dan membanting tulang. Beras adalah satu komoditas yang tidak bisa diperas Amerika Serikat sehingga penjualannya tidak bergantung pada negara itu. Jika dalam keadaan tertentu seperti perang negara masih memiliki kelebihan beras untuk diekspor, maka negara tidak akan terisolir. Sehingga untuk pemasukan negara bisa melalui impor tekstil, kertas dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Peninjauan kembali kebijakan impor beras serta strategi membangkitkan industri pertanian membuktikan bahwa ketahanan pangan harus bersifat aktif yakni upaya produksi pangan yang meningkat. Ini sejalan dengan tuntutan bahwa salah satu alat utama diskursif yang digunakan untuk meliberalisasi pertanian pada 1980-an adalah "ketahanan pangan," yang seharusnya paling baik dicapai melalui perdagangan daripada swasembada<sup>69</sup>.

## **N. Stabilitas**

Politik ekonomi yang berkeadilan hendaknya dapat menghantarkan tujuan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat. Untuk menuju kea rah ini diperlukan penguatan pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat sipil. Termasuk dalam menciptakan stabilitas nasional melalui peningkatan produksi pangan<sup>70</sup>.

## **O. Politik Ekonomi Berbasis Kekuatan Pangan**

Syafruddin berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengubah politik ekonominya dengan mencurahkan sebagian besar tenaga dan pikiran bukan saja kepada politik impor dan pembelian beras di dalam maupun di luar negeri, melainkan kepada pertanyaan bagaimanakah cara memperbesar produksi

<sup>67</sup> Prawiranegara (2011: 85); Prawiranegara (1952).

<sup>68</sup> Prawiranegara (2011: 84).

<sup>69</sup> Otero and Pechlaner.

<sup>70</sup> Hasan Mustapa, 'POLITICAL REGIONAL TOURISM IN CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE (Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuwangi District, Garut Regency, West Java Province)', *POLITICON (July)*, 1.1 (2019).

beras dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masalah lain seperti transmigrasi dan industrialisasi dan sebagainya harus berpusat dan dikoordinasikan dengan produksi beras itu. Stabilitas ekonomi tidak bisa dicapai apabila negara belum sanggup menutup kebutuhan berasnya dari produksi sendiri.<sup>71</sup>

#### **P. Perampangan Birokrasi dan Penyederhanaan Distribusi**

Salah satu kendala dalam sistem akses pasar bagi para petani dalam perdagangan ialah munculnya segelintir orang yang memiliki akses terhadap regulasi. Di samping birokrasi yang ribet. Terkait ini Syafruddin, figure yang sangat mengedepankan pentingnya sinergitas pemerintahan yang baik dan masyarakat sipil<sup>72</sup>, berpendapat bahwa sistem lisensi yang digagas pemerintah tahun 1950-an mungkin maksudnya baik, hendak memajukan ekonomi nasional, memberantas kemiskinan dan membagi-bagikan kekayaan masyarakat dengan lebih merata. Namun, cara pemerintah menuju hal itu melalui serangkaian regulasi oleh para birokrat pegawai negeri, seringkali bukannya menghilangkan berbagai keganjilan di masyarakat, namun justru memperkeruh problem birokratis yang sudah ada.

Lisensi merupakan sebuah kebijakan yang diberikan kepada pengusaha dalam negeri guna membatasi kekuatan modal asing dan memberikan stimulant bagi kebangkitan pengusaha pribumi. Dalam praktiknya, para pedagang Indonesia ini kebanyakan tidak memiliki uang maupun pengalaman. Mereka pun mencari lisensi lalu menjualnya kepada para pemodal kuat sesuai wewenang lisensi tersebut baik melakukan impor barang, mendirikan pabrik atau menjual beras.<sup>73</sup>

Selain itu, sistem lisensi yang diberikan pemerintah justru menjadi benteng bagi beberapa saudagar dengan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sikap rakus mereka malah menghisap rakyat dengan

---

<sup>71</sup> (Prawiranegara, 2011: 90)

<sup>72</sup> Hasan Mustapa, *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017).

<sup>73</sup> Syafruddin Prawiranegara, 'Motif Atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum Islam', *Suara Partai Masjumi*, VI.11/12 (November-Desember) (1951).

perantara pedagang asing yang bermodal. Ia mencontohkan ketika masih distribusi gula dan penjualannya masih diatur dengan lisensi, maka harga gula di pasar tidak kurang dari Rp. 3,50. Bahkan di beberapa daerah harga gula ada yang sampai Rp. 9,00 atau lebih. Padahal pokoknya hanyalah kurang lebih Rp. 1,50. Sesudah distribusi gula dihapuskan dan penjualannya tidak lagi terikat lisensi, harga gula di luar merosot sampai paling mahal Rp. 3,00, dengan stok di pasar yang lebih banyak. Karena gula yang tadinya ditimbun oleh para spekulasi gula dilepaskan kembali ke pasar.

Ia lalu menyarankan, pemerintah dapat mempertimbangkan sampai di mana mahalnya harga beras sekarang disebabkan karena sejumlah regulasi mengenai pembelian dan penjualan padi dan beras. Bila penjualan penjualan dan impor beras dibebaskan dari kepentingan politik yang rumit, maka persediaan di pasar akan lebih banyak dengan harga memadai.<sup>74</sup>

Empat elemen utama ketahanan pangan: Akses, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Stabilitas melintasi semua bidang pemrograman ketahanan pangan dan mendukung teori-teori perubahan yang bekerja menuju peningkatan ketahanan pangan. Di tingkat tertinggi, kemitraan mengakui bahwa tujuan terpenting adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan.<sup>75</sup>

Sebenarnya, kebijakan politik pertanian dengan kekuatan good governance prospektif, terlebih jika ditunjang infrastruktur yang efektif guna merangsang pertumbuhan dan konstruk sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, serta sumber daya pertanian yang andal.<sup>76</sup> Sayangnya, hal ini masih belum menemukan momentum implementatif yang ideal.

## Q. Kesimpulan

Krisis global akibat menyebarnya pandemic wabah Covid-19 secara liar perlu disikapi dengan prospektif. Dalam hal ini Syafruddin Prawiranegara telah

---

<sup>74</sup> Prawiranegara, 'Motif Atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum Islam'.

<sup>75</sup> FAO.

<sup>76</sup> Hasan Mustapa and Udin Saripudin, 'Food Socio-Politics and Sharia Finance in Indonesia: Agricultural Development in Islamic Political Economic Perspectives', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2022), 110–27 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.8874>>, h. 110.





mengingatkan bahwa di saat kondisi genting dan situasi tidak normal, hambatan dalam industry sekunder hanya berakibat tertahannya akses pada sektor sekunder. Namun, kendala pada sektor primer seperti seperti kelangkaan pangan dapat mengancam keajegan stabilitas nasional. Karenanya, hal ini perlu disikapi salah satunya dengan upaya revitalisasi industry pertanian yang berdimensi jangka panjang.

## .References

- Abdulai, Awudu, and Christian Kuhlitz, *Food Security Policy in Developing Countries, The Oxford Handbook of the Economics of Food Consumption and Policy*, 2012  
<<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199569441.013.0014>>
- Akbar, Caesar, 'Kementan Sebut Penerapan PSBB Hambat Distribusi Pangan', *April, 20th*, 2020 <<https://bisnis.tempo.co/read/1333612/kementan-sebut-penerapan-psbb-hambat-distribusi-pangan>> [accessed 29 April 2020]
- Ali, Fachry, 'M. Dawam Rahardjo Dan Sjafruddin Prawiranegara: Sebuah Refleksi Apresiasi', in *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religiu: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*, ed. by Izzuddin Washil and Reno Azwir, 1st edn (Bandung: Mizan Publika, 2011)
- Asmara, Chandra Gian, 'Jokowi Wanti-Wanti Kelangkaan Pangan Hingga Inflasi Meroket', *March 01*, 2022  
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220301103216-4-319131/jokowi-wanti-wanti-kelangkaan-pangan-hingga-inflasi-meroket>> [accessed 19 March 2022]
- Azra, Azyumardi, 'Negarawan Progresif', in *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara: Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017), pp. ix–xi
- , 'Virus Corona Stigmatisasi', *April, 17th*, 2020  
<<https://republika.co.id/berita/q8qilw282/virus-corona-stigmatisasi>> [accessed 29 April 2020]
- , 'Wabah Covid-19 Dan Kriminalitas', *April, 23*, 2020  
<<https://republika.co.id/berita/q98ji4318/wabah-covid19-dan-kriminalitas>> [accessed 29 April 2020]
- Bakti, Andi Faisal, 'Komunikasi Politik Islam "Sang Presiden Yang Terlupakan"',



- in *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara: Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017), pp. xiii–xvi
- Balié, Jean, Lalita Bhattacharjee, Michael Clark, Frédéric Dévé, Ciro Fiorillo, Juan Carlos, and others, 'STRENGTHENING SECTOR POLICIES FOR BETTER FOOD SECURITY AND NUTRITION RESULTS. Political Economy Analysis', 2017, 36 <<http://www.fao.org/3/a-i7212e.pdf>>
- Boratyńska, Katarzyna, and Raqif Tofiq Huseynov, 'An Innovative Approach to Food Security Policy in Developing Countries', *Journal of Innovation and Knowledge*, 2.1 (2017), 39–44  
<<https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.007>>
- Cullen, Maximo Torero, 'COVID-19 and the Risk to Food Supply Chains: How to Respond', *FAO* (Rome: FAO, 2020), pp. 1–7  
<<https://doi.org/10.4060/ca8388en>>
- Diana, Leidy, De Souza De Oliveira, Eluiza Alberto, De Moraes Watanabe, and Dario De, 'Public Policies for Food Security in Countries with Different Development Levels', *International Public Management Review*, 11.3 (2010), 122–41
- DKP, *Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi Tahun 2015-2019* (Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan RI, 2015)
- FAO, *The State of Food Insecurity in the World 2001* (Rome: FAO, 2001)
- Karplus, Lauren, 'ISU ReD : Research and EData Post-Development Theory and Food Security : A Case Study in Swaziland Advisor : Professor Noha Shawki', 2014
- Kurniawan, Bagus, 'Konflik Rusia Dan Ukraina Ancaman Kelaparan Global Dan Krisis Ketahanan Pangan Dunia', *March 19, 2022*  
<<https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-254017219/konflik-rusia-dan-ukraina-ancaman-kelaparan-global-dan-krisis-ketahanan-pangan-dunia>> [accessed 21 March 2022]
- Kuzmin, Evgeny A., 'Sustainable Food Security: Floating Balance of Markets', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6.1 (2016), 37–44
- Kwasek, Mariola, 'Threats To Food Security and Common Agricultural Policy', *Economics of Agriculture*, 59.4 (2013), 701–13
- Laoli, Noverius, 'Kebijakan PSBB Jamin Kelangsungan Ekspor Impor, Begini Respons Importir', *April, 05th, 2020*  
<<https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-psbb-jamin-kelangsungan-ekspor-impor-begini-respons-importir>> [accessed 2 May 2020]
- Lassa, Jonathan A., 'Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005', 2005



- <<https://doi.org/10.1080/17499510802369140>>
- Limanseto, Haryo, 'Strategi Pemerintah Mendorong Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani', *June 03*, 2021  
<<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3044/strategi-pemerintah-mendorong-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-petani>> [accessed 19 March 2022]
- Limenta, Michelle Engel, and Sianti Chandra, 'Indonesian Food Security Policy', *Indonesia Law Review*, 7.2 (2017), 245–65  
<<https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.198>>
- Martin, Nik, 'Rusia Blokir Jalur Utama Ekspor Gandum, Pasokan Pangan Dunia Terancam', *March 18*, 2022 <<https://www.dw.com/id/rusia-disebut-blokir-jalur-perdagangan-gandum-global/a-61170522>> [accessed 21 March 2022]
- Mustapa, Hasan, *Pemikiran Politik Islam Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Good Governance, Civil Society Dan Islam Transformatif*, 1st edn (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017)
- , 'POLITICAL REGIONAL TOURISM IN CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE (Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuwesmi District, Garut Regency, West Java Province)', *POLITICON (July)*, 1.1 (2019)
- , 'Reaktualisasi Pemikiran Keagamaan Syafruddin Prawiranegara (1911-1988)', *Indo-Islamika*, 2.Juli-Desember (2017), 145–70  
<<https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14820>>
- Mustapa, Hasan, Andi Faisal Bakti, Faruq Ansori, Udin Saripudin, and Yusep Budiansyah, 'Good Governance and Corruption in the View of Syafruddin Prawiranegara ( 1911-1989 )', 24.04 (2020), 5336–50  
<<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201631>>
- Mustapa, Hasan, and Udin Saripudin, 'Food Socio-Politics and Sharia Finance in Indonesia: Agricultural Development in Islamic Political Economic Perspectives', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2022), 110–27  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.8874>>
- Mustapa, Hasan, and M.A. Syi'aruddin, 'Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3.1 (2020), 133–52  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1721>>
- Omar, Sarena Che, *Ensuring Food Security during the Covid-19 Pandemic*, 2020
- Otero, Gerardo, and Gabriela Pechlaner, 'The Political Economy of “ Food Security ” and Trade : Uneven and Combined Dependency The

- Political Economy of “ Food Security ” and Trade : Uneven and Combined Dependency \*’, *Rural Sociology*, 78.3 (September) (2013), 263–289 <<https://doi.org/10.1111/ruso.12011>>
- Pérez-Escamilla, Rafael, ‘Food Security and the 2015–2030 Sustainable Development Goals: From Human to Planetary Health’, *Current Developments in Nutrition*, 1.7 (2017), e000513 <<https://doi.org/10.3945/cdn.117.000513>>
- Permatasari, Desi, ‘Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Level 4’, *July* 31, 2021 <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>> [accessed 13 March 2022]
- Pinstrup-Andersen, P., *The Political Economy of Food and Nutrition Policies*, ed. by P. Pinstrup-Andersen (IFPRI. The Johns Hopkins University Press, 1993)
- Prabowo, Hermas E., ‘PSBB Dan Kesiapan Stok Pangan Indonesia’, *April*, 12nd, 2020 <<https://kompas.id/baca/opini/2020/04/12/psbb-dan-kesiapan-stok-pangan-indonesia/>> [accessed 29 April 2020]
- Prabowo, Rossi, ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia’, *Mediagro*, 6.2 (2010), 62–73
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi Dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam: Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2*, ed. by Ajip Rosidi, 2nd edn (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)
- , ‘Herorientasi Di Lapangan Pembangunan Ekonomi’, *Suara Partai Masjumi*, VI.4 (April) (1952)
- , ‘Herorientasi Di Lapangan Pembangunan Ekonomi’, *Suara Partai Masjumi*, VII.4 (April) (1952)
- , ‘Motif Atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum Islam’, *Suara Partai Masjumi*, VI.11/12 (November-Desember) (1951)
- , ‘Recollection of My Career’, *BIES*, 23.3 (Desember) (1987), 100–108
- Rahardjo, M. Dawam, *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*, ed. by Izzuddin Washil and Reno Azwir, 1st edn (Jakarta: Mizan Publika, 2011)
- , ‘Pemikiran Ekonomi Islam: Perkembangan Dan Perspektifnya’, in *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1987)
- Rahim, Abdur, ‘PSBB Dapat Picu Kelangkaan Pangan Di Daerah’, *April*, 28th, 2020 <<https://www.kompas.tv/article/78511/psbb-dapat-picu-kelangkaan-pangan-di-daerah>> [accessed 29 April 2020]
- , ‘Stok Pangan Dalam Negeri Defisit, Ini Rinciannya’, *April*, 28th, 2020

- <<https://www.kompas.tv/article/78507/stok-pangan-dalam-negeri-defisit-ini-rinciannya>> [accessed 29 April 2020]
- Ruiz Estrada, Mario Arturo, *The Role of National Food Security in a Massive Pandemic: The Case of COVID-19*, *SSRN Electronic Journal*, 2020, MMXIX <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3560998>>
- Said, Abdul Azis, 'Terdampak PPKM, Kesejahteraan Petani Turun Pada Juli', *August 02*, 2021  
<<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6107c035f265d/terdampak-ppkm-kesejahteraan-petani-turun-pada-juli>> [accessed 18 March 2022]
- Santosa, Dwi Andreas, 'Waspada Pangan Pada 2022', *March 16*, 2022  
<<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/16/waspada-pangan-pada-2022/>> [accessed 19 March 2022]
- Saragih, Juli Panglima, 'Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17.2 (2016), 57–80  
<<https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>>
- Smith, James, 'Poverty, Sovereignty and Resistance in Southern Africa', *Afriche e Orienti. Rivista Ai Confini Tra Africa, Medio-Oriente e Mediterraneo*, Bologna, 2003, 2
- Tanchum, Michaël, 'THE RUSSIA-UKRAINE WAR HAS TURNED EGYPT ' S FOOD CRISIS INTO AN EXISTENTIAL THREAT TO THE ECONOMY', 2022, pp. 1–6
- Thomson, Henry, 'Food and Power: Agricultural Policy under Democracy and Dictatorship', *Comparative Politics*, 49.2 (January) (2017), 273–93  
<<https://www.jstor.org/stable/24886201>>
- Tweeten, Luther, 'Food Security', in *Promoting Third World Development and Food Security*, ed. by Tweeten and Donald G. McClelland (Westport, CT: Praeger, 1997), pp. 25–56
- Uvin, Peter, 'The State of World Hunger', in *The Hunger Report*, ed. by Uvin (Yverdon, Switzerland: Gordon and Breach, 1994), pp. 1–47
- Wie, Thee Kian, 'Krisis Ekonomi Di Indonesia Pada Pertengahan 1960-an Dan Akhir 1990-an Suatu Perbandingan', in *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20*, ed. by Ben White and Peter Boomgaard (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)
- , *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-An* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)